

Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kepercayaan Publik atas Laporan Keuangan Daerah Medan

Angelica Sinaga^{1*}, Cindy Lumbantoruan², Larissa Saragih³, Sonita Putri Natalia⁴, Putri Kemala Dewi Lubis⁵, Nela Permata Sari Lubis⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: angelicasinaga819@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5748>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 28 Feb 2026

Revised: 06 Mar 2026

Accepted: 12 Mar 2026

Kata Kunci:

Kompetensi Aparatur,
Kepercayaan Publik,
Laporan Keuangan
Daerah, Persepsi
Masyarakat.

Keywords:

Civil Service
Competence, Public
Trust, Regional
Financial Reports,
Public Perception.



Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada laporan keuangan daerah Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan tujuh orang masyarakat sebagai informan yang dipilih secara purposive, dengan kriteria berdomisili di Kota Medan dan memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kompetensi aparatur, yang mencakup kemampuan teknis, pemahaman regulasi, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, memiliki peran penting dalam membentuk tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan daerah. Ketika aparatur dinilai kompeten dan bekerja secara transparan, kepercayaan publik cenderung meningkat; sebaliknya, keraguan terhadap kapasitas dan integritas aparatur dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

This study aims to understand how public perception of government officials' competence influences the level of public trust in Medan City's regional financial reports. The study used a qualitative descriptive approach involving seven community members as informants who were selected purposively, with the criteria of being domiciled in Medan City and having knowledge or experience related to public services and regional financial management. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using interactive analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with source triangulation to maintain data validity. The results show that the public assesses the competence of government officials, which includes technical skills, understanding of regulations, professionalism, and responsibility in financial management, as having an important role in shaping the level of trust in regional financial reports. When officials are deemed competent and work transparently, public trust tends to increase; conversely, doubts about the capacity and integrity of government officials can affect the level of public trust.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Angelica Sinaga, et al. (2026), Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kepercayaan Publik atas Laporan Keuangan Daerah Medan, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5748>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, tetapi juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik secara transparan dan akuntabel. Di Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan dengan tingkat aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan yang dinamis, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena besarnya volume anggaran, beragamnya program prioritas pembangunan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan daerah berperan sebagai instrumen utama yang mencerminkan bagaimana pemerintah merencanakan, merealisasikan, serta mengevaluasi penggunaan anggaran daerah secara sistematis dan terukur. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan, mengelola sistem pengendalian internal secara konsisten, serta menyajikan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan daerah pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya, karena keberhasilan penerapan akuntabilitas sektor publik ditentukan oleh kompetensi aparatur pemerintah itu sendiri (Mardiasmo, 2018).

Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah menjadi elemen yang sangat penting dalam membangun legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan menilai bagaimana anggaran daerah dikelola serta dipertanggungjawabkan. Penilaian tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap informasi, pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan pelayanan pemerintah, serta persepsi terhadap profesionalisme aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Ketika aparatur pemerintah dipandang memiliki kemampuan teknis yang memadai, menjunjung tinggi kejujuran, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, maka laporan keuangan yang disusun akan lebih mudah diterima sebagai informasi yang objektif dan dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila muncul keraguan terhadap integritas, transparansi, atau kompetensi aparatur, maka tingkat kepercayaan publik dapat menurun meskipun laporan tersebut secara administratif telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas formal suatu laporan belum tentu sejalan dengan tingkat penerimaan masyarakat apabila tidak didukung oleh persepsi positif terhadap pihak yang menyusunnya. Kepercayaan pada dasarnya lahir dari keyakinan bahwa institusi atau individu akan bertindak secara konsisten, jujur, serta dapat diandalkan dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan (Fukuyama, 1995).

Kompetensi aparatur pemerintah merupakan faktor fundamental yang menentukan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, karena seluruh proses pencatatan, pengklasifikasian, hingga penyajian informasi keuangan berada dalam tanggung jawab sumber daya manusia yang menjalankannya. Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan aspek teknis, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta pemahaman terhadap regulasi keuangan daerah, tetapi juga mencakup kemampuan analitis dalam menafsirkan data keuangan, ketelitian dalam memverifikasi dokumen pendukung, serta sikap profesional dan etis dalam menjalankan amanah publik. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu meminimalkan kesalahan administrasi, mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah secara objektif. Selain itu, kompetensi juga berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam menjelaskan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, sehingga laporan keuangan tidak hanya secara teknis, tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Kompetensi pada dasarnya merupakan karakteristik dasar individu yang berkaitan langsung dengan kinerja efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan, sehingga menjadi determinan penting dalam menentukan kualitas hasil kerja dan tingkat profesionalisme suatu organisasi (Spencer & Spencer, 1993).

Pemerintah

Istilah Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara seperti kabinet merupakan suatu Pemerintah. Istilah

Pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintahkan (SF Marbun 1997).

Adapun pemahaman mengenai arti dari Pemerintah dari beberapa sumber :

1. Pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggungjawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi system dimana mereka menjadi bagiannya. Menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya. Apter (1965:84)
2. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. David Apter (1977:29)
3. Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. W.S Sayre (1960)
4. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. David Apter (1977).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel. Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan oleh instansi pemerintah daerah untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan semua pihak di luar. Akuntansi sektor publik adalah teknik akuntansi dan mekanisme analisis yang nantinya akan diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga negara tingkat atas dan bawah, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pemerintah, industri publik, organisasi perusahaan, LSM dan sipil organisasi masyarakat, serta melamar proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasi dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menyasar mereka yang membutuhkan untuk membuat keputusan. Adapun yang menjadi tujuan dari penerapan dari akuntansi sektor publik yakni:

Untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien dan ekonomis serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi, untuk dapat memberikan informasi kepada publik, memungkinkan manajer untuk mempertanggungjawabkan kinerja, melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat, dan secara efektif mengelola program dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kewenangannya dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan secara terbuka kinerja pemerintah dan penggunaan dana publik.

Menurut Rany maulidia (2021), Berikut adalah karakteristik akuntansi sektor publik yang penting untuk diketahui :

1. Berdasarkan penggunaan, akuntansi jenis ini digunakan oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah.
2. Dari sisi sifatnya, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba.
3. Sedangkan dari fokus tujuan lembaga, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka.
4. Dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence dan sangat kompleks.

Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Menurut Munawir (2010:5) adalah “dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan.” Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugilaba

Menurut Kasmir (2013: 7) “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18) laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan dimulai dari bukti transaksi, sesudah itu akan dicatat pada buku harian yang disebut jurnal. Selanjutnya, secara periodik dari jurnal dikelompokkan menjadi buku besar sesuai dengan transaksinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat tentang kompetensi aparatur pemerintah memengaruhi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, pandangan, serta pengalaman subjektif masyarakat sebagai informan utama. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali secara komprehensif bagaimana masyarakat menilai kemampuan, profesionalisme, serta tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan daerah *Moleong (2017)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif informan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang masyarakat Kota Medan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi berdomisili di Kota Medan serta memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai pelayanan publik maupun informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Jumlah 7 informan dinilai memadai dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan pada kedalaman dan kekayaan informasi dibandingkan jumlah responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih luas dan fleksibel, sehingga informasi yang diperoleh lebih detail dan kontekstual. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan setiap informan, kemudian hasil wawancara ditranskrip untuk memudahkan proses analisis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban antar informan guna melihat konsistensi pola persepsi yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan, terlihat bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi aparatur Pemerintah Kota Medan memiliki kaitan yang erat dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap laporan keuangan daerah. Bapak Andi Pratama menyampaikan bahwa meskipun masyarakat tidak melihat secara langsung proses penyusunan laporan keuangan, profesionalisme aparatur dan minimnya persoalan yang terdengar di publik sudah cukup menjadi dasar munculnya rasa percaya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap sikap dan kinerja aparatur menjadi pertimbangan utama dalam menilai dapat atau tidaknya laporan keuangan dipercaya.

Paparan dari berbagai sumber mengenai dampak positif penerapan akuntansi sektor publik berikut memperkuat pernyataan diatas :

1. Menurut *Bapak Jhon Siregar* : Menurut saya, kemampuan aparatur pemerintah memang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Kami memang tidak melihat langsung proses penyusunan laporan keuangan, tetapi kalau aparatur terlihat profesional dan jarang terdengar masalah, tentu kami lebih yakin bahwa laporan yang dibuat itu benar. Jadi bagi saya, kompetensi itu menjadi dasar munculnya rasa percaya.
2. Menurut *Bapak Gio Sihombing* : “Saya melihatnya dari kinerja pemerintah secara umum. Kalau program pembangunan berjalan dan pelayanan publik terasa manfaatnya, saya cenderung percaya bahwa pengelolaan keuangannya juga baik. Jadi kompetensi aparatur itu menurut saya terlihat dari hasil kerja mereka. Kalau hasilnya nyata, kepercayaan juga ikut meningkat”.
3. Menurut *Ibu Yohana Panjaitan* : “Menurut saya bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal tanggung jawab dan kejujuran. Aparatur mungkin saja paham aturan, tapi kalau tidak transparan tetap saja masyarakat ragu. Kalau saya melihat pemerintah cukup terbuka dan tidak ada isu besar soal penyimpangan, saya jadi lebih percaya terhadap laporan keuangan daerah”.
4. Menurut *BoniFasius Limbong* : “Menurut saya, masyarakat sekarang sudah lebih kritis. Kalau aparatur pemerintah terbuka dalam menyampaikan informasi dan tidak tertutup soal penggunaan anggaran, itu menunjukkan mereka paham dan mampu menjalankan tugasnya. Dari situ kepercayaan publik bisa terbentuk. Jadi persepsi saya terhadap kompetensi mereka memang berpengaruh langsung terhadap keyakinan saya atas laporan keuangan daerah”.
5. Menurut *Meykana Felicia* : “Terus terang saya tidak terlalu paham soal teknis laporan keuangan, tetapi saya percaya kalau aparatur yang menyusunnya memang ahli di bidangnya dan bekerja jujur. Kompetensi menurut saya bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal tanggung jawab dan integritas. Kalau dua hal itu ada, saya sebagai masyarakat lebih mudah percaya terhadap laporan keuangan daerah”.

Pandangan Masyarakat terhadap Kompetensi Aparatur Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tujuh informan, terlihat bahwa masyarakat memandang kompetensi aparatur pemerintah sebagai hal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun para informan tidak mengetahui secara langsung proses penyusunan laporan keuangan, mereka memiliki penilaian tersendiri terhadap kemampuan aparatur. Penilaian tersebut umumnya didasarkan pada profesionalisme yang tampak, kelancaran program pemerintah, serta minimnya isu atau pemberitaan negatif terkait pengelolaan anggaran. Sebagian informan menyampaikan bahwa kompetensi aparatur dapat dilihat dari hasil kerja yang nyata. Ketika pembangunan berjalan dan pelayanan publik dirasakan manfaatnya, maka masyarakat cenderung menilai bahwa pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan baik. Ada pula informan yang menekankan pentingnya latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur, karena pengelolaan keuangan daerah dianggap membutuhkan keahlian khusus. Dari jawaban-jawaban tersebut terlihat bahwa masyarakat memaknai kompetensi bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak kinerja yang dirasakan secara langsung.

1.3 Faktor Pendorong Penggunaan E-Wallet

Peran Integritas dan Transparansi dalam Membentuk Persepsi

Selain kemampuan teknis, aspek kejujuran dan keterbukaan menjadi hal yang cukup dominan dalam jawaban informan. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa kemampuan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan tanggung jawab moral. Aparatur mungkin memahami aturan dan prosedur, tetapi apabila tidak transparan, masyarakat tetap akan meragukan laporan keuangan yang disampaikan.

Keterbukaan informasi menjadi poin yang sering disebutkan. Informan menginginkan agar pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan secara formal, tetapi juga mampu menjelaskan penggunaan anggaran dengan bahasa yang mudah dipahami. Bagi sebagian masyarakat, tidak adanya kasus besar atau isu penyimpangan yang mencuat juga menjadi indikator bahwa aparatur cukup mampu dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbentuk dari kombinasi antara informasi yang tersedia, pengalaman pribadi, dan kondisi sosial yang berkembang.

Pengaruh Persepsi terhadap Kepercayaan atas Laporan Keuangan Daerah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi aparatur Pemerintah Kota Medan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan mereka terhadap laporan keuangan daerah. Para informan pada umumnya tidak menilai laporan dari sisi teknis atau rincian angka, melainkan dari bagaimana mereka memandang kinerja aparatur selama ini. Ketika aparatur dianggap profesional, jarang terdengar terlibat persoalan, serta mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata

melalui pembangunan dan pelayanan publik, maka laporan keuangan lebih mudah diterima tanpa banyak keraguan. Sebaliknya, jika muncul keraguan terhadap kemampuan atau integritas aparatur, maka laporan yang disampaikan pun cenderung dipandang dengan sikap hati-hati dan kritis.

Selain itu, konsistensi pemerintah dalam menyampaikan laporan secara rutin dan keberlanjutan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat turut memperkuat rasa percaya tersebut. Informan menilai bahwa kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang terlihat di lapangan menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya terbentuk dari dokumen laporan keuangan itu sendiri, tetapi juga dari persepsi terhadap kualitas, tanggung jawab, dan kesungguhan aparatur yang mengelolanya. Persepsi yang positif akan mendorong tumbuhnya kepercayaan, sedangkan persepsi yang negatif berpotensi melemahkan legitimasi laporan keuangan di mata masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi aparatur Pemerintah Kota Medan memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepercayaan publik atas laporan keuangan daerah. Masyarakat pada umumnya tidak menilai laporan keuangan dari aspek teknis atau rincian angka yang disajikan, melainkan dari bagaimana mereka memandang kemampuan, sikap, dan kinerja aparatur yang mengelolanya. Profesionalisme, hasil kerja yang terlihat dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta minimnya isu negatif menjadi dasar terbentuknya persepsi positif terhadap kompetensi aparatur.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa integritas, transparansi, dan konsistensi merupakan faktor penting yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Aparatur yang dinilai terbuka dalam menyampaikan informasi, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta konsisten dalam menyampaikan laporan setiap periode cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyajian laporan secara administratif, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang berada di balik penyusunannya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur, baik dari sisi kemampuan teknis maupun integritas dan keterbukaan, menjadi langkah penting dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian ke depan. Pertama, Pemerintah Kota Medan perlu terus meningkatkan kompetensi aparatur, khususnya dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Peningkatan ini tidak hanya melalui pelatihan teknis di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga melalui penguatan etika kerja, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Kedua, aspek transparansi perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menerima laporan keuangan dalam bentuk dokumen formal, tetapi juga memahami isi dan penggunaannya secara lebih sederhana dan terbuka. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu membangun persepsi positif serta memperkuat kepercayaan publik.

Ketiga, pemerintah daerah diharapkan menjaga konsistensi dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan memastikan adanya kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Konsistensi ini penting karena kepercayaan publik dibangun secara bertahap dan dapat melemah apabila terjadi ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dan kondisi di lapangan.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah informan atau menambahkan sudut pandang dari unsur lain, seperti akademisi atau praktisi pemerintahan, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kompetensi aparatur dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah.

REFERENSI

Nasirwan, A. V. M., Siahaan, A., & Sitohang, A. A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Dinas Kesehatan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(7), 274-284.

- Arista, R., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah (Pud) Pasar Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(5), 585-594.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ&utm_source=
- Francis Fukuyama. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. Free Press. https://books.google.com/books/about/Trust.html?id=j0LC6XZtH84C&utm_source=
- Lyle M. Spencer., & Signe M. Spencer. (1993). Competence at work: Models for superior performance. JohnWiley&Sons. https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ&utm_source=
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–76. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Matondang, K. A., Pasaribu, R. P., Selpiana, & Sinaga, F. A. (2025). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3(1).